

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam konteks penanggulangan bencana, logistik kemanusiaan memiliki fungsi yang sangat signifikan, di mana kecepatan dan efisiensi pengiriman bantuan sangat menentukan keselamatan para korban dalam kondisi darurat. Logistik kemanusiaan meliputi perencanaan, pengadaan, transportasi, penyimpanan, hingga pendistribusian barang dan layanan penting di area terdampak bencana (Mahendra, 2024). Ilmu ini secara khusus berfokus pada aspek logistik dalam sistem manajemen bencana, mencakup pembelian, penyimpanan, dan transportasi kebutuhan dasar seperti makanan, air, obat-obatan, dan perlengkapan lainnya, serta sumber daya manusia, mesin dan peralatan yang dibutuhkan, termasuk evakuasi korban luka sebelum dan sesudah terjadinya bencana (Fajarini, 2023)

Tujuan krusialnya adalah tercapainya distribusi bantuan kemanusiaan dan peralatan penanggulangan bencana kepada pihak yang membutuhkan dan wilayah terdampak tepat waktu, dengan jenis dan volume yang relevan, dalam keadaan yang prima, dan dengan penggunaan anggaran yang efisien serta dapat dipertanggungjawabkan. Esensinya, logistik kemanusiaan berfokus pada penyaluran bantuan yang benar kepada orang yang benar pada saat yang benar. Tanpa adanya logistik yang efektif, bahkan rencana tanggap darurat yang paling matang pun berpotensi mengalami kegagalan (Zaroni, 2017).

Mengingat kontribusi aspek logistik yang mencapai 80% dari keseluruhan kegiatan dalam operasi kemanusiaan, ini menegaskan perannya yang krusial dalam penanganan bencana (Kovács & Spens, 2007). Kabupaten Boyolali, wilayah di Provinsi Jawa Tengah, memiliki karakteristik geografis yang menjadikannya rentan terhadap bencana. Dengan letak yang strategis antara dataran rendah yang subur dan sebagian wilayah pegunungan yang meliputi lereng Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, Boyolali sering menghadapi ancaman bencana seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem (Danil, 2021). Berikut adalah data kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Boyolali:

Tabel 1.1 Laporan Kejadian Bencana di Kabupaten Boyolali
Periode 1 Januari – 31 Maret 2025

No	Kab/Kota	Jenis Bencana	Waktu Kejadian
1.	Boyolali	Banjir	2025-03-08 18:30 WIB
2.	Boyolali	Cuaca Ekstrem	2025-02-28 15:00 WIB
3.	Boyolali	Longsor	2025-02-23 21:30 WIB
4.	Boyolali	Cuaca Ekstrem	2025-02-17 13:00 WIB
5.	Boyolali	Cuaca Ekstrem	2025-02-08 10:39 WIB

Sumber: CEVADIS (*Central Java Disaster Information System*)
BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2025

Berdasarkan data diatas, Kabupaten Boyolali mencatat tiga jenis bencana yaitu banjir, cuaca ekstrem, longsor pada Januari-Maret 2025, cuaca ekstrem myang paling sering terjadi, kejadian bencana alam terjadi selama tiga bulan pertama tahun 2025 menunjukkan tingginya intensitas dan frekuensi bencana di wilayah ini (<https://cevadis.bpbd.jatengprov.go.id/>). Situasi ini secara langsung menuntut kesiapsiagaan dan respons yang cepat serta terkoordinasi dari BPBD Kabupaten Boyolali.

Manajemen bencana sendiri adalah siklus komprehensif yang meliputi kesiapsiagaan, respons darurat, dan pemulihan pasca bencana, bertujuan untuk mengurangi dampak risiko dan mempercepat pemulihan masyarakat yang terkena bencana. Keberhasilan manajemen ini sangat bergantung pada pemberian bantuan yang sigap dan akurat guna meminimalkan korban (Tictona et al., 2020).

Penanggulangan bencana yang berlandaskan pada logistik kemanusiaan harus dilaksanakan selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Peraturan ini secara eksplisit mewajibkan BNPB dan BPBD membangun sistem manajemen logistik dan peralatan sebagai langkah kesiapsiagaan untuk menjamin ketersediaan, penyimpanan, dan penyaluran bantuan bencana yang terkoordinasi (Mandasini et al., 2023).

Lebih lanjut, Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan mengamanatkan pengelolaan logistik dan peralatan secara efisien, akurat, dan akuntabel, yang dalam konteks ini mencakup penerimaan, penanganan material, penyimpanan, pemeliharaan inventaris, distribusi, pengendalian jumlah dan kondisi stok, serta laporan inventaris logistik dan peralatan penanggulangan bencana guna mempertahankan kualitas dan kuantitasnya (Hariyani & Wardhono, 2022).

Efektivitas manajemen pergudangan pada fase pra-bencana merupakan aspek krusial dalam kesiapsiagaan, memungkinkan identifikasi jenis dan kuantitas logistik yang dibutuhkan secara cepat dan akurat untuk respons darurat dan pemulihan (Hidayat et al., 2018). Sehubungan dengan ini, gudang logistik BPBD memiliki fungsi strategis sebagai pusat penyimpanan sementara untuk mendukung respons darurat, khususnya pada kejadian bencana alam (Sianturi et al., 2024).

Penyimpanan logistik dan peralatan kebencanaan di gudang bertujuan untuk menjaga kondisi agar tetap layak pakai, mencegah kerusakan, kehilangan, dan menurunnya kualitas sebelum distribusi atau pemakaian. Untuk operasional BPBD yang efektif dan efisien, gudang dengan standar kelayakan yang terpenuhi dan dilengkapi protokol pengamanan serta keselamatan yang andal merupakan hal yang fundamental. Semua peralatan dan logistik kiriman dari BNPB Pusat harus disimpan sementara di gudang penyimpanan, dicatat secara sistematis dan diorganisir sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan gudang yang berlaku sebelum didistribusikan (Mandasini et al., 2023).

Secara umum, BPBD mengelola dua jenis fasilitas penyimpanan, yaitu gudang logistik untuk menyimpan bantuan kemanusiaan, dan gudang peralatan yang menampung berbagai sarana serta prasarana pendukung dalam operasi evakuasi korban bencana alam, dengan proses operasional pergudangan meliputi penerimaan, penyimpanan, perawatan, pendistribusian, dan pengawasan barang (Rudy, 2024).

BPBD Kabupaten Boyolali sebagai instansi utama dalam manajemen bencana di wilayahnya (Putri et al., 2023), memiliki Bidang Kedaruratan dan Logistik yang bertanggung jawab atas seluruh proses logistik kemanusiaan, dari pengadaan hingga distribusi (Hidayat et al., 2018). Namun, dalam praktiknya, pengelolaan logistik kemanusiaan, khususnya pada aspek perencanaan, pengadaan, penyimpanan, transportasi, dan pendistribusian, masih kerap dihadapkan pada berbagai kendala yang dapat menghambat efektivitas respons bencana.



Gambar 1.1 Kondisi Penempatan Barang di Gudang BPBD Kabupaten Boyolali

Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2024

Gambar 1.1 menunjukkan kondisi penempatan barang di gudang BPBD Kabupaten Boyolali. Terdapat penataan barang yang belum terorganisir dengan baik, yaitu penempatan barang yang tidak sesuai dengan jenisnya serta rak yang belum dilengkapi label nama barang yang jelas.

Permasalahan ini tidak hanya terbatas pada penyimpanan. Pada tahap perencanaan, seringkali terjadi kendala dalam akurasi data kebutuhan di lapangan, menyebabkan perkiraan yang tidak tepat mengenai jenis dan jumlah logistik yang diperlukan (Balcik et al., 2010). Hal ini diperparah oleh kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, yang bisa berujung pada duplikasi bantuan atau tidak terpenuhinya kebutuhan spesifik korban. Pada fase pengadaan, tantangan muncul dari proses tender yang panjang dan birokratis, serta keterbatasan pasokan barang-barang esensial dari produsen lokal, memaksa organisasi kemanusiaan untuk mencari pasokan dari jarak jauh dengan biaya lebih tinggi dan waktu yang lebih lama (Thomas & Kopczak, 2008).

Selanjutnya, masalah penyimpanan (pengudangan) seperti yang terlihat di BPBD Boyolali seperti penataan yang tidak terorganisir dengan baik secara signifikan menghambat efisiensi operasional dan menyulitkan proses pencarian serta pengambilan barang yang dibutuhkan saat darurat (Widowati & Ningtyas, 2022). Hal ini diperkuat oleh temuan umum dalam banyak operasi logistik kemanusiaan bahwa masalah pengelolaan gudang, termasuk penataan dan pemilahan, menjadi salah satu faktor utama yang menghambat kecepatan dan ketepatan distribusi bantuan (Wibowo & Purwanto, 2021).

Sebagai contoh konkret, laporan dari Palang Merah Indonesia (PMI) pada beberapa kejadian bencana di Indonesia seringkali menyoroti bahwa tumpukan barang yang tidak terorganisir di gudang menjadi penyebab keterlambatan penyaluran bantuan esensial, seperti makanan siap saji atau selimut, yang seharusnya bisa tiba lebih cepat di tangan korban. Keterlambatan ini bukan hanya soal waktu, tetapi juga dapat berimplikasi pada kesehatan dan keselamatan jiwa korban (PMI, 2022).

Pada aspek transportasi, infrastruktur yang rusak pasca-bencana, ketersediaan armada yang terbatas, serta kesulitan akses ke area terdampak menjadi hambatan serius. Tantangan medan, seperti jalan yang terputus akibat longsor atau banjir, seringkali memaksa penggunaan moda transportasi alternatif yang lebih lambat dan mahal (Christopher & Tatham, 2011). Terakhir, pada tahap pendistribusian, masalah sering muncul dari kurangnya data akurat mengenai lokasi dan jumlah penerima bantuan, menyebabkan distribusi yang tidak merata atau salah sasaran. Konflik di antara masyarakat penerima atau masalah keamanan di lapangan juga dapat menghambat proses distribusi (Rahardjo & Santosa, 2019).

Logistik kemanusiaan sangat menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam pendistribusian bantuan, dari titik asal hingga penerima manfaat (Chandes & Pache, 2010). Kecepatan dan ketepatan dalam pendistribusian menjadi sangat krusial dalam kondisi darurat, karena keterlambatan dapat berdampak serius pada keselamatan jiwa dan kerugian materi yang lebih besar (Zaitun & Vivian, 2024).

Kondisi gudang yang tidak optimal di BPBD Kabupaten Boyolali ini berisiko memperparah tantangan yang sudah ada, seperti keterbatasan sumber daya dan koordinasi, sehingga menghambat respons bencana yang efektif di wilayah tersebut. Misalnya, ketika terjadi bencana seperti banjir yang melanda Boyolali, penataan gudang yang tidak terorganisir dengan baik dapat menyebabkan keterlambatan dalam menemukan dan mengeluarkan perahu karet atau logistik makanan bagi korban yang terjebak, padahal setiap menit sangat berharga dalam operasi penyelamatan (Putra & Wijaya, 2022).

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengidentifikasi “**Analisis Manajemen Logistik Kemanusiaan dalam Penanggulangan Bencana di BPBD Kabupaten Boyolali**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana manajemen logistik kemanusiaan dalam penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Boyolali?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat manajemen logistik kemanusiaan dalam penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Boyolali?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui manajemen logistik kemanusiaan dalam penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Boyolali.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat manajemen logistik kemanusiaan dalam penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Boyolali.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

1. Mengkontribusikan keahlian yang dimiliki lulusan Program Studi D-IV (Sarjana Terapan) Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dalam memecahkan masalah logistik di dunia kerja.
2. Mengoptimalkan pengetahuan dan sumber daya peneliti guna mengaplikasikan wawasan yang telah diperoleh dalam rangka pengembangan solusi-solusi inovatif.

1.4.2 Bagi Program Studi

1. Mengakomodasi umpan balik yang diterima guna merevisi materi perkuliahan agar lebih relevan dengan kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Boyolali.
2. Menginisiasi dan mengembangkan kemitraan yang konstruktif dan saling menguntungkan di antara berbagai pihak yang berkepentingan.

1.4.3 Bagi Perusahaan

1. Pembentukan kemitraan strategis antara BPBD Kabupaten Boyolali dan Program Studi D-IV Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.

2. Berperan sebagai sumber informasi dalam memandu upaya optimalisasi manajemen logistik kemanusiaan pada fase tanggap darurat bencana di BPBD Kabupaten Boyolali.